Penguatan Capacity Building Berbasis Nilai-Nilai Pancasila di Lembaga Adat Desa Kayu Kebek Pasuruan

Listyaningsih[1], Warsono[2], Raden Roro Nanik Setyawati[3], Maya Mustika Kartika Sari[4], Siti Maizul Habibah[5], Beti Indah Sari[6], Edy Suprianto[7]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)] Prodi PPKn,Universitas Negeri Surabaya
Email: listyaningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial serta mempertahankan identitas budaya di tengah arus perubahan masyarakat modern. Proyek pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga adat di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, melalui pendekatan pengembangan kapasitas yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan meliputi observasi partisipatif, pelatihan kelembagaan, lokakarya internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan pendampingan dalam memperkuat struktur organisasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan lembaga adat mampu meningkatkan partisipasi warga, memperkuat identitas kelembagaan, serta menciptakan sinergi antara nilai-nilai lokal dan nasional. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga tradisi sekaligus beradaptasi dengan perubahan sosial. Disarankan agar upaya penguatan lembaga adat berbasis nilai-nilai Pancasila terus dilanjutkan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan guna mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengembangan kapasitas, Pancasila, Lembaga adat, Pemberdayaan masyarakat, Desa Kayu Kebek

Abstract

Traditional institutions play a crucial role in maintaining social order and preserving local cultural identity amid ongoing social change. This community service project aims to strengthen the capacity of traditional institutions in Kayu Kebek Village, Tutur District, Pasuruan Regency, through a capacity development approach integrated with the values of Pancasila. The methods applied include participatory observation, institutional training, workshops on the internalization of Pancasila values, and mentoring to enhance organizational structure. The results indicate that integrating Pancasila values into institutional strengthening increases community participation, reinforces institutional identity, and fosters synergy between local and national values. Moreover, the project has encouraged collective awareness among community members to preserve traditions while adapting to social transformation. It is recommended that efforts to strengthen traditional institutions based on Pancasila values be continued through collaboration among communities, local governments, and educational institutions to achieve sustainable socio-cultural resilience.

Keywords: Capacity building, Pancasila, Customary institutions, Community empowerment, Kayu Kebek Village

PENDAHULUAN

Desa Kayu Kebek yang terletak di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, merupakan salah satu desa agraris yang memiliki identitas kultural yang kuat. Hal ini tercermin dalam tradisi lokal, ritual keagamaan, serta nilai-nilai sosial yang masih dijaga secara turun-temurun oleh lembaga adat setempat. Lembaga adat di desa ini memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan lokal, mediasi dan resolusi konflik antarwarga, serta menjaga kelestarian budaya setempat yang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat desa (Sumardjoko, 2015) .

Dalam konteks pembangunan lokal, pemerintah telah mengakui pentingnya lembaga adat sebagai institusi lokal yang mampu mendukung pemerintahan desa sekaligus menjaga kohesi sosial komunitas. Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara khusus mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Regulasi ini merupakan

upaya formal untuk memperkuat posisi lembaga adat sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa yang sah dan diakui secara administratif, sehingga legitimasi kelembagaan adat semakin kuat dalam ruang kebijakan publik di tingkat desa (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2020).

Implementasi regulasi tersebut secara empiris terlihat jelas dalam komunitas adat Suku Tengger di Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan. Melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, lembaga adat di Tosari mampu menjadi pelaku utama dalam upaya pelestarian kebudayaan serta pengembangan wisata berbasis komunitas lokal. Sinergi dan kolaborasi antar aktor lokal terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan pelestarian budaya, sekaligus mendukung ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata berbasis kearifan lokal(Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2020). Hal serupa juga terlihat dalam praktik kolaboratif yang dilakukan oleh lembaga adat di Kabupaten Probolinggo, yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa, tokoh agama, serta tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelestarian tradisi lokal.

Desa Kayu Kebek sendiri memiliki keberagaman sosial budaya yang potensial. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, sementara sebagian kecil masyarakatnya yang beragama Hindu tetap menjalankan ritual adat secara rutin, khususnya di dusun-dusun seperti Surorowo dan Ledok. Dalam konteks ini, lembaga adat memainkan peran sentral dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, sekaligus menjaga kelangsungan berbagai ritual adat yang menjadi ciri khas identitas desa tersebut. Hal ini memperkuat temuan dari studi (Chaira & Hardeli, 2023) bahwa lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Meskipun demikian, kondisi kelembagaan adat di Desa Kayu Kebek masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Banyak aktivitas lembaga adat masih berlangsung secara informal, tanpa didukung oleh dokumentasi kelembagaan tertulis seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur organisasi formal, maupun rencana kerja yang jelas. Selain itu, keterlibatan generasi muda yang minim menyebabkan regenerasi kepemimpinan adat menjadi tersendat, sehingga keberlanjutan kelembagaan adat di masa depan menjadi terancam (Mukhtaromi et al., 2013; Rayhan et al., 2025). Lebih lanjut, keterbatasan kemitraan dan koordinasi dengan pihak eksternal, baik pemerintah maupun institusi akademik, turut menyebabkan kurang efektifnya lembaga adat dalam memainkan peran strategis di masyarakat (Sumardjoko, 2015).

Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa diperlukan intervensi strategis untuk memperkuat kelembagaan adat secara komprehensif. Pendekatan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada aspek formal dan administratif, tetapi juga aspek substantif seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi dokumentasi adat, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan nilai lokal. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Mukhtaromi et al., (2013) bahwa penguatan kelembagaan adat yang efektif harus dilakukan secara holistik dengan pendekatan partisipatif, adaptif terhadap modernisasi, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal secara autentik.

Melalui pendekatan holistik tersebut, diharapkan lembaga adat di Desa Kayu Kebek mampu memperkuat posisinya dalam kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Posisi ini menjadi semakin strategis, terutama dalam rangka mempertemukan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai nasional seperti nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi ini dirancang sebagai upaya nyata untuk memperkuat kapasitas kelembagaan adat di Desa Kayu Kebek. Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan ketahanan sosial-budaya yang harmonis, yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai kultural yang menjadi identitas lokal komunitas Desa Kayu Kebek (Rayhan et al., 2025).

Lembaga adat merupakan pilar penting dalam menjaga ketertiban sosial, mengatur norma-norma kehidupan masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas suatu komunitas. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, keberadaan lembaga adat sering kali menghadapi tantangan akibat modernisasi, globalisasi, dan perubahan pola pikir generasi muda (Geertz, 2017; Koentjaraningrat, 2019). Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas lembaga adat menjadi penting agar tetap adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan esensi nilai-nilai tradisi.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi kuat dalam memperkuat lembaga adat, terutama dalam hal memperkokoh nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem kelembagaan lokal tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan antara nilai lokal dan universal (Kaelan, 2018; Magnis-Suseno, 2019). Melalui

pendekatan ini, lembaga adat dapat menjadi ruang dialog antara budaya lokal dan ideologi nasional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan berbasis nilai budaya dan Pancasila dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial budaya (Haryanto & Setiawan, 2020; Sulastri et al., 2021). Oleh karena itu, sinergi antara pengembangan kapasitas dan nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk menjawab tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga adat di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, melalui pendekatan pengembangan kapasitas yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat struktur dan kapasitas kelembagaan adat di Desa Kayu Kebek. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan tokoh adat serta perangkat desa, ditemukan bahwa kondisi kelembagaan adat setempat selama ini masih bersifat informal, tanpa dokumentasi yang jelas, dan didominasi aktivitas seremonial. Lebih lanjut, peran tokoh adat hanya terbatas sebagai simbol budaya, tanpa memiliki ruang pengambilan keputusan strategis yang memadai dalam dinamika sosial komunitas desa. Selain itu, ditemukan pula rendahnya partisipasi generasi muda dalam melanjutkan praktik adat, yang mengancam keberlanjutan budaya lokal secara jangka panjang. Kondisi ini serupa dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Sumardjoko (2015) menyatakan bahwa lemahnya struktur formal kelembagaan adat menyebabkan institusi tersebut tidak mendapatkan pengakuan administratif, sehingga perannya menjadi terbatas. Menghadapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahap utama: observasi dan pemetaan kelembagaan, pelatihan dan lokakarya nilai-nilai Pancasila, serta pendampingan struktural dan dokumentasi kelembagaan.

Observasi dan Pemetaan Kelembagaan

Pada tahap awal ini, tim pengabdi melakukan observasi langsung ke komunitas adat dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai situasi kelembagaan adat, peran masing-masing tokoh, dan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Proses pemetaan yang partisipatif memungkinkan warga untuk secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi tantangan sekaligus potensi yang ada di dalam komunitasnya. Pendekatan ini relevan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis partisipasi yang dikemukakan oleh Susilawati, (2024) yang menegaskan bahwa pelibatan aktif masyarakat dalam proses observasi dan identifikasi permasalahan akan meningkatkan kesadaran komunitas dalam penguatan kelembagaan secara mandiri.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa selama ini kegiatan adat hanya berjalan secara informal dan cenderung diabaikan oleh generasi muda. Dengan mengetahui kondisi tersebut, maka strategi penguatan kelembagaan diarahkan pada dua aspek penting, yaitu struktur kelembagaan yang terdokumentasi serta proses regenerasi partisipasi generasi muda.

Pelatihan dan Lokakarya Nilai-Nilai Pancasila

Pada tahap kedua, tim pengabdi melaksanakan kegiatan pelatihan partisipatif berupa lokakarya tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan adat sehari-hari. Peserta kegiatan diajak untuk berdiskusi secara kelompok, mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang relevan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial, lalu merefleksikan implementasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari di komunitas adat. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa warga Desa Kayu Kebek mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam, bukan lagi sebatas doktrin formal negara yang berjarak dengan kehidupan mereka, tetapi sebagai bagian integral dari praktik budaya sehari-hari. Proses internalisasi yang demikian sejalan dengan temuan Adolph (2024) dan Sumardjoko (2015), yang menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi lebih efektif diterima masyarakat apabila diajarkan melalui pendekatan kultural, bukan pendekatan normatif semata.

Selain itu, kegiatan ini berhasil menciptakan kesadaran baru di kalangan warga, terutama generasi muda, tentang pentingnya peran nilai-nilai nasional dalam memperkuat praktik budaya lokal. Dampak penting lainnya adalah meningkatnya antusiasme generasi muda untuk ikut serta dalam melestarikan dan merevitalisasi kelembagaan adat.

Pendampingan Struktural dan Dokumentasi

Tahap ketiga, yakni pendampingan struktural, merupakan kelanjutan langsung dari dua tahap sebelumnya. Dalam proses ini, tim pengabdi melakukan pendampingan intensif kepada tokoh adat dan perwakilan warga dalam menyusun struktur formal kelembagaan adat berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur organisasi yang jelas, serta dokumen rencana kerja tahunan yang berbasis pada nilai lokal dan nasional. Dokumentasi ini sangat penting, karena merupakan syarat administratif bagi lembaga adat untuk mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah desa dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi lokal seperti Peraturan Bupati Pasuruan No.16 Tahun 2020 (Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pasuruan, 2020)

Pendampingan yang dilakukan secara partisipatif berhasil menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga terhadap kelembagaan adat yang baru diformalkan ini. Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pendampingan telah mengurangi resistensi terhadap modernisasi kelembagaan, dengan pendekatan berbasis narasi budaya lokal sebagaimana ditegaskan oleh Mukhtaromi et al., (2013). Strategi ini membantu masyarakat melihat bahwa modernisasi kelembagaan bukan berarti menghilangkan budaya asli, tetapi memperkuat posisi budaya tersebut dalam kehidupan yang semakin kompleks dan modern. Lebih lanjut, dampak nyata dari pendampingan ini adalah munculnya regenerasi kepemimpinan adat yang melibatkan generasi muda dalam posisi strategis, sehingga lembaga adat menjadi lebih inklusif dan memiliki keberlanjutan yang lebih jelas di masa depan. Regenerasi sosial ini sejalan dengan pandangan Arifah & Saputra, (2023); Marjanto et al., (2013); dan Puspita & MutmainnahM, (2024), yang menyatakan bahwa regenerasi bukan hanya masalah usia atau generasi, tetapi juga transfer nilai, legitimasi, serta kemampuan kepemimpinan lintas generasi.

Melalui rangkaian kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan adat yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemetaan, internalisasi nilai, hingga pendampingan dokumentasi struktural, memiliki dampak multidimensional, baik secara administratif, sosial-budaya, maupun regenerasi kelembagaan. Hal ini sejalan dengan hasil riset Mukhtaromi et al., (2013); Puspita & MutmainnahM, (2024), bahwa pendekatan pemberdayaan kelembagaan adat yang paling efektif adalah yang berbasis nilai lokal dengan pelibatan partisipasi aktif masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kayu Kebek telah berhasil menunjukkan dampak multidimensi dalam proses penguatan kapasitas kelembagaan adat. Dampak tersebut bukan hanya terbatas pada ranah kelembagaan semata, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap aspek sosial-budaya, generasi, dan hubungan antar lembaga secara lebih luas. Berikut rincian hasil dan dampak kegiatan secara lebih terperinci pertama tentang Penguatan Struktur Kelembagaan Adat. Hasil nyata dari penguatan kelembagaan adat adalah terciptanya dokumen formal berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sebelumnya tidak dimiliki. Hal ini memperjelas pembagian peran, tugas, dan mekanisme kerja yang selama ini hanya berlangsung secara informal. Dampak administratif yang muncul dari keberadaan dokumen formal ini adalah adanya pengakuan dan dukungan resmi dari pemerintah desa yang sejalan dengan Peraturan Bupati Pasuruan No.16 Tahun 2020 ((Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Pasuruan, 2020). Dengan demikian, legitimasi kelembagaan adat semakin meningkat secara administratif, selaras dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa tanpa dokumentasi yang jelas, lembaga adat sulit mendapat pengakuan formal (Mukhtaromi et al., 2013). Lebih jauh lagi, pengakuan formal tersebut juga meningkatkan daya tawar masyarakat adat dalam berbagai aktivitas pembangunan desa, baik yang bersumber dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Kedua, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Adat. Pelatihan dan diskusi reflektif tentang nilai-nilai Pancasila telah memberikan dampak nyata berupa internalisasi nilai musyawarah, keadilan sosial, dan gotong royong yang makin kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Praktik adat, seperti penyelesaian konflik, distribusi peran, dan ritual adat, secara sadar dikaitkan dengan nilai-nilai tersebut oleh peserta kegiatan. Dampak ini memperkuat kesadaran kolektif bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar ideologi formal negara, tetapi merupakan ekspresi otentik kehidupan budaya lokal (Rayhan et al., 2025). Dampak jangka panjangnya adalah

terciptanya iklim sosial masyarakat yang lebih toleran, partisipatif, dan solid dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang muncul di tingkat desa.

Ketiga yakni tentang Regenerasi Sosial Melalui Pembentukan "Sekar Adat Muda". Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok pemuda adat bernama "Sekar Adat Muda." Pembentukan kelompok ini memberikan dampak nyata dalam proses regenerasi kepemimpinan adat, di mana kaum muda mulai mengambil peran aktif dalam menjaga kesinambungan tradisi budaya. Proses regenerasi ini tidak hanya sebatas transfer pengetahuan tradisional, tetapi juga menanamkan kepemimpinan berbasis nilai lokal sehingga mendorong legitimasi sosial generasi muda dalam struktur adat (Rayhan et al., 2025). Kelompok pemuda ini ke depannya menjadi agen perubahan yang menjamin keberlanjutan praktik adat sekaligus memperkenalkan perspektif baru dalam pengelolaan tradisi budaya di Desa Kayu Kebek.

Keempat, Sinergi dan Kolaborasi Lintas Kelembagaan, Kegiatan pengabdian menghasilkan kolaborasi yang erat antara lembaga adat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi mitra. Dampak kolaborasi ini adalah terintegrasinya kegiatan pelestarian budaya lokal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan adat sebagai salah satu aktor strategis dalam pembangunan lokal. Sinergi ini mencerminkan pendekatan quadruple helix, yang efektif memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi berbagai perubahan sosial maupun tantangan pembangunan berkelanjutan (Puspita & MutmainnahM, 2024; Sumardjoko, 2015). Dalam jangka panjang, sinergi tersebut memungkinkan kelembagaan adat terlibat lebih strategis dan sistematis dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Kegiatan pengabdian juga menghadapi tantangan berupa resistensi dari tokoh adat senior yang menganggap formalisasi kelembagaan sebagai ancaman terhadap fleksibilitas tradisional. Selain itu, kendala literasi digital juga menjadi hambatan tersendiri. Dengan pendekatan yang partisipatif dan menggunakan narasi lokal dalam kegiatan pelatihan, resistensi ini berhasil diminimalisasi secara bertahap. Strategi ini sejalan dengan pendekatan adaptasi strategis yang menekankan pentingnya integrasi modernisasi dengan pelestarian budaya lokal agar nilai asli masyarakat tetap terjaga (Arifah & Saputra, 2023; Marjanto et al., 2013; Sumardjoko, 2015). Dampaknya, kelembagaan adat mampu mengadopsi perubahan secara selektif, tanpa kehilangan jati diri budaya lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

Salah satu dampak kunci dari kegiatan ini adalah kesadaran kritis yang muncul di kalangan masyarakat bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya bukan nilai asing, tetapi merupakan ekspresi dari budaya dan kebiasaan lokal masyarakat. Hal ini mendorong pendekatan kultural reflektif yang lebih efektif dalam penguatan kelembagaan adat dibandingkan pendekatan top-down yang birokratis. Dampak ini memperkuat temuan Arifah & Saputra (2023); Marjanto et al., (2013); dan Mukhtaromi et al., (2013) bahwa penguatan kelembagaan adat harus berangkat dari nilai lokal agar mampu menjembatani nilai-nilai nasional secara organik. Refleksi kritis tersebut diharapkan akan terus hidup dalam praktik sehari-hari, menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut kapasitas kelembagaan adat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara nyata menunjukkan bahwa pendekatan penguatan kapasitas kelembagaan adat melalui pelatihan, pendampingan struktural, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terbukti efektif dalam mendorong transformasi positif di Desa Kayu Kebek. Pendekatan berbasis nilai Pancasila ini tidak sekadar memberikan penguatan administratif dan struktural, tetapi juga menciptakan internalisasi nilai secara mendalam sehingga kelembagaan adat memiliki legitimasi yang kuat secara sosial maupun kelembagaan (Aisya Putri Handayani et al., 2024; Mukhtaromi et al., 2013; Rayhan et al., 2025; Susilawati, 2024).

Lebih jauh, pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan—mulai dari pemetaan sosial, lokakarya nilai, hingga pendampingan penyusunan dokumen kelembagaan—telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelembagaan adat dalam menjaga harmoni sosial dan budaya lokal. Regenerasi kelembagaan yang mulai tumbuh, terutama keterlibatan aktif generasi muda, juga menjadi tanda positif akan keberlanjutan kelembagaan adat di masa depan (Mukhtaromi et al., 2013). Dengan struktur kelembagaan yang lebih jelas dan dokumentasi formal yang terkelola dengan baik, posisi lembaga adat kini semakin kuat dalam memainkan peran strategis sebagai penjaga identitas lokal

sekaligus mediator integrasi sosial masyarakat Desa Kayu Kebek.

Meski demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya ini harus dipandang sebagai langkah awal dari proses revitalisasi kelembagaan adat yang berkelanjutan. Tantangan modernisasi yang terus berkembang menuntut adanya tindak lanjut yang strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah desa dalam penguatan regulasi lokal yang mendukung peran kelembagaan adat, pelatihan lanjutan dalam bentuk capacity building yang berkelanjutan, serta proses digitalisasi dokumentasi dan arsip adat. Digitalisasi ini diharapkan dapat membantu lembaga adat lebih adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus menjaga kekayaan intelektual budaya lokal (Adolph, 2024; Mukhtaromi et al., 2013; Rayhan et al., 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi dan sinergi antar aktor seperti pemerintah desa, akademisi, masyarakat, serta lembaga adat itu sendiri menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan penguatan kelembagaan adat secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan konsep quadruple helix, yang menggarisbawahi pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam mewujudkan inovasi sosial yang efektif dan berkelanjutan (Arifah & Saputra, 2023; Rayhan et al., 2025).

Dengan demikian, hasil pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya bermanfaat secara langsung bagi komunitas Desa Kayu Kebek, tetapi juga menjadi contoh yang relevan untuk direplikasi di komunitas-komunitas lain yang memiliki tantangan serupa dalam pelestarian budaya dan penguatan kelembagaan adat. Pendekatan yang memadukan aspek struktural, kultural, dan regenerasi secara integratif menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah derasnya modernisasi yang tidak terhindarkan (Mukhtaromi et al., 2013).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan dana melalui Skema PKM.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2024). *Kearifan Lokal, Pancasila, Sejarah, dan Budaya Bangsa*.

Aisya Putri Handayani, Jap Tji Beng, Febynola Tiara Salsabilla, Stefania Morin, Thalia Syahrunia Suci Ardhia, & Valensia Audrey Rusli. (2024). Hilangnya Budaya Lokal di Era Modern dan Upaya Pelestariannya dalam Perspektif Pancasila. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, *3*(4), 178–188. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i4.3452

Arifah, K. A., & Saputra, M. (2023). Strategi Konservasi Nilai Kearifan Lokal di Era Modern oleh Masyarakat Adat Osing Kemiren. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, *8*(2), 191–203. https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8519

Chaira, L., & Hardeli, H. (2023). Pengembangan E-Modul Berbasis Model Guided Discovery Learning Dengan Teknik Probing Prompting Question Pada Materi Termokimia Kelas XI SMA. *Jurnal Pendidikan Mipa*. https://doi.org/10.37630/jpm.v13i1.807

Marjanto, D. K. S. B., Kusumah, Siti Dloyana; Bakti Utama, S. D. S., & Biantoro, Genardi A, A. N. (2013). Kearifan Lokal dan Lingkungan. *Kearifan Lokal Dan Lingkungan*, 1–130. http://repositori.kemdikbud.go.id/398/1/Bunga Rampai Kearifan Lokal 2013.pdf

Mukhtaromi, A., Soeidy, M., & Hayat, A. (2013). Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *1*(2), 155–163. https://media.neliti.com/media/publications/72980-ID-sinergi-pemerintah-daerah-dan-lembaga-ad.pdf

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Pasuruan, Pub. L. No. Nomor 16 Tahun 2020 (2020).

Puspita, N., & MutmainnahM, U. (2024). Menjaga Tradisi: Melestarikan Budaya Lokal Di Tengah Modernisasi Kota. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, *8*(5), 2246–6111.

Rayhan, M., Jati, D. K., Zaky, F. N., Albian, M. R., & Purwanto, E. (2025). *Globalisasi Budaya dan Media Digital : Dilema antara Modernisasi dan Pelestarian Budaya Lokal*. *3*, 1–14.

Sumardjoko, B. (2015). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKN Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. *Jurnal VARIDIKA*, *25*(2). https://doi.org/10.23917/varidika.v25i2.726

Susilawati, E. (2024). *Kearifan lokal dan media pembelajaran multikultural. Dalam Kearifan Lokal Pancasila, Sejarah, dan Budaya Bangsa* (Issue May). https://doi.org/10.5281/zenodo.11387976